



**MEREKA YANG
MELANJUTKAN KEHIDUPAN
(REFLEKSI PERJUANGAN PEREMPUAN
TIMOR TIMUR PULIH DARI KONFLIK)**

Dewi Nova Wahyuni

Prolog

Siang itu angin kering dan matahari memanasi Kecamatan Miomaffo Timur, di wilayah perbatasan Timur Tengah Utara (TTU), NTT dan Ambenu, Timor Leste. Dari dataran yang lebih tinggi beberapa orang ibu berdiri memandang hamparan desa di wilayah seberang. Seorang ibu bercerita sambil menunjuk pada lembah di wilayah Timor Leste.

"Itu rumah saya sebelah sana, waktu kerusakan jajak pendapat mereka membakar rumah saya. Saya dan keluarga lari melalui lembah dan kebun, sampai akhirnya kami tiba di Desa Tes. Lihat! Sekarang

rumah itu telah diperbaiki, tapi saya tidak tahu siapa yang menempati.”

Sementara ibu yang lainnya menambahkan.

“Saya juga tinggal di desa yang sama. Suatu hari suami saya kembali ke Ambenu untuk melihat rumah kami, tetapi sejak itu dia tidak pernah kembali. Saya dengar dia sudah menikah lagi.”

Seorang TNI penjaga perbatasan menghampiri kami :

“Ibu-ibu mau kemana?”

Salah seorang dari kami menjawab, kami sedang ingin melihat-lihat Timor Leste dari jauh. “Saya tahu ibu-ibu orang sini, saya tahu ibu punya kebun di sekitar sini, saya sudah sering melihat ibu-ibu. Cukup sampai sini saja kalau mau lihat-lihat.” tegur petugas sambil menunjuk pada pos penjagaan yang mereka tempati.

Perbincangan itu terjadi beberapa bulan lalu ketika saya—saat itu bekerja di Yayasan PIKUL—melakukan pertemuan dengan salah satu kelompok perempuan di Desa Tes. Dari kutipan peristiwa dapat diberikan gambaran bagaimana konflik bersenjata mengakibatkan tercerabutnya hak-hak dasar yang perempuan miliki. Perempuan kehilangan tempat tinggal, lingkungan, dan sumber hidup. Pada banyak kasus, konflik juga mengakibatkan perempuan kehilangan anggota keluarganya, sebagaimana penuturan seorang ibu berikut ini.

“Pada bulan September 1999 terjadi kekacauan di Timor Timur. Banyak orang ketakutan dan lari mengungsi ke NTT. Tanggal 12 September 1999, saya dipaksa Om saya untuk ikut mengungsi ke NTT. Om saya mengatakan, “jika tidak keluar sekarang, maka kalau kamu kembali, kamu semua akan habis.” Pada hari itu 3 malam kami tidur di Betanu. Lalu pada tanggal 15 September 1999 kami naik kapal laut dan datang ke Kupang (naik kapal perang TNI). Suami saya tidak ikut mengungsi, padahal waktu itu ia juga ikut mengangkat barang ke atas kapal. Suami saya waktu itu bilang, “kamu pergi dahulu, nanti baru saya menyusul lewat jalan darat.” Ternyata ia tidak ikut mengungsi karena orang tuanya tidak mengungsi,

sementara menurut adat, anak laki-laki tidak boleh meninggalkan orang tuanya. Kami sampai di Kupang tanggal 16 September 1999 dan tinggal di Tuapukan. Satu minggu kemudian kami pindah lagi ke Soe (di Kamp Kobelete). Kami mengungsi dengan om saya bernama Fernando yang anggota TNI. Sebenarnya saya ingat suami saya dan punya keinginan untuk pulang, tapi saya harus bersama-sama dengan saudara-saudara saya yang lain yang rencananya akan kembali bulan Maret tahun 2000.¹

Konflik juga telah mengakibatkan perempuan mengalami kekerasan secara luar biasa, terutama dari pihak-pihak yang bertentangan. Amaku, seorang perempuan yang pernah ditahan Kodim Dilli karena dicurigai terlibat dalam peristiwa penyerbuan ke Dilli, memaparkan:

“Pada jam-jam pemeriksaan mereka juga memanfaatkannya untuk memperkosa para napi perempuan, termasuk yang dialami oleh saya. Pada waktu sedang diperiksa, tiba-tiba saya ditarik masuk kamar lalu pakainya dilucuti dengan paksa oleh Kapten Jarot yang waktu itu melakukan intograsi. Saya tidak berdaya melawannya karena diancam dengan senjata di tangannya. Waktu itu saya masih gadis dan berumur 16...²

Pada masa pasca konflik—di kamp pengungsian—kekerasan terus mengancam mereka. Situasi pengungsian yang serba terbatas dengan seluruh persoalan di dalamnya, seringkali dilimpahkan dan dicituskan dari laki-laki dan akibatnya perempuan sebagai sasaran kekerasan. Dalam suatu perbincangan, Hery Mamboik seorang relawan TKTB (Tim Kemanusiaan Timor Barat)³—menyampaikan pengalamannya mendampingi perempuan korban kekerasan suami di kamp pengungsian:

“Suatu hari ketika saya dan Toda sedang di Kamp Noelbaki, Kupang, seorang perempuan mendatangi kami dengan rambut berlumuran darah, terus menetes membasahi punggungnya. Rupanya kepala perempuan ini dipukul berulang-ulang dengan papan yang terdapat paku oleh suaminya. Ia mengalami bocor pada beberapa bagian kepala. Kami



Reuters-Steve Tickner

mencoba membawanya ke Puskesmas, tetapi karena ia seorang pengungsi ia hanya diberi obat merah. Selanjutnya mama-mama mengobatinya dengan obat tradisional sampai lukanya kering."

Hery juga mengakui sempat panik ketika melihat seorang perempuan hamil yang diinjak-injak suaminya, hingga mengalami pendarahan hebat. Sementara tidak ada orang yang berani untuk menolong perempuan itu. Pengalaman Hery menunjukkan bahwa selain situasi konflik, perempuan juga menghadapi posisi yang lebih rentan untuk dikenai kekerasan dan dibiarkan dalam situasi kekerasan akibat budaya patriarkal yang mengepungnya.

Bagi perempuan yang mengungsi di daerah perbatasan, mereka juga rentan mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari TNI penjaga wilayah perbatasan. Dalam suatu diskusi kampung, Helena Ninef ketua kelompok perempuan pengungsi di Desa Tes, Kecamatan Miomaffo Timur di wilayah perbatasan Timur Tengah Utara (TTU), NTT dan Ambenu, Timor Leste, menyampaikan tentang banyaknya kasus perempuan yang dihamili oleh TNI penjaga perbatasan. Setelah itu mereka ditelantarkan atau hanya diselesaikan secara adat, yang tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan mendukung hak

perempuan tersebut. Eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan militer terhadap perempuan juga terjadi di kamp pengungsian. Pada buku *Perempuan di bawah Laki-laki yang Kalah: Kekerasan Terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian Timor Barat* dipaparkan :

"Seorang pengungsi perempuan berlaku seperti germo ketika ia menerima uang setiap kali ia mengizinkan keponakan sendiri dibawa keluar kamp oleh anggota TNI. Ketika si gadis hamil, anggota TNI mengancam ibu 'germo' lewat surat menuntut 20 juta rupiah disediakan seandainya ia harus mempertanggungjawabkan kehamilan pada orang tua dari gadis yang ia hamili. Selain itu, anggota TNI tersebut membakar wajah ibu ini dengan api rokok."⁴

Dengan demikian, berbicara pemulihan pasca konflik di Timor Leste bagi perempuan berkaitan dengan banyak hal. Mulai dari pemulihan luka dan trauma akibat kekerasan yang langsung mereka alami, bagaimana bertahan hidup, dan bagaimana dapat diterima oleh masyarakat lokal di tempat mereka mengungsi. Untuk sampai pada proses bagaimana mereka pulih ataupun membantu pemulihan sesama korban pasca konflik tentu saja memerlukan proses yang panjang.

Dari pemulihan trauma, pemulihan ekonomi sampai ke rekonsiliasi

Sejarah kekerasan yang dialami perempuan Timor Leste adalah sejarah panjang sejak tahun 1974, dimana pada masa itu terjadi konflik antara tiga kekuatan yaitu kekuatan FRETILIN (kelompok yang memilih kemerdekaan penuh secara langsung), kekuatan UDT (kelompok yang menginginkan pelepasan bertahap yang didahului otonomi di bawah kekuasaan Portugis dan kekuatan Apodeti (kelompok yang memilih integrasi dengan Indonesia. Kekerasan kemudian berlanjut selama 24 tahun kekuasaan Indonesia (1975-1999) ditandai dengan terdesaknya pasukan UDT yang melarikan diri ke Atambua, Timor Barat. Indonesia kemudian membentuk pasukan-pasukan milisi sipil untuk melawan FRETILIN. Sejak konflik antar kelompok itu terjadi, perempuan Timor Leste mengalami perkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan kekerasan lainnya oleh masing-masing pihak yang bertikai. Kerusakan pasca Jajak Pendapat 1999 membawa eksodus warga sipil Timor Timur ke Timor Barat. Di Timor Barat kurang lebih terdapat 200 kamp pengungsian.

Banyak perempuan kemudian menjadi sasaran kekerasan suami mereka dan terbelit segala persoalan di kamp-kamp yang mereka tempati. Dalam situasi konflik tubuh perempuan seringkali dijadikan sasaran baik oleh pihak lawan maupun oleh kelompoknya sendiri, tak terkecuali orang-orang di lingkungannya yang terdekat, di antaranya dari pihak suami.

Secara umum Tim Kemanusiaan Timur barat (TKTB) memilah data kekerasan terhadap perempuan sebelum jajak pendapat, saat jajak pendapat, dan setelah jajak pendapat ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel
Perhitungan Kompilasi Data Berdasarkan Jenis Kekerasan

JENIS KEKERASAN	TAHAP I: Kasus jauh sebelum jajak pendapat	TAHAP II: Kasus saat jajak pendapat, langsung sebe- lum & setelahnya	TAHAP III: Kasus dalam kamp di Timor Barat	JUMLAH
Kawin Paksa	3	-	-	3
Perkosaan	3	1	4	8
Perpecehan Keluarga	3	13	10	26
Ingkar Janji	3	2	6	11
KTD	2	3	3	8
Penganiayaan	-	1	6	7
Pelecehan Seksual	-	-	14	14
KDRT	10	1	53	64
Pelacuran	-	-	1	1
Yang lain	2	11	7	20
Jumlah	26	32	104	162

Sumber: Karen Cabel Nelson dkk, *Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat* (Kupang: JKPI dan PIKUL 2000) hal. 104

Berdasarkan tabel di atas nampak jelas bahwa angka kekerasan terhadap perempuan terjadi lebih banyak setelah jajak pendapat. Meskipun menurut TKTB kasus kekerasan yang dicatat dan diinvestigasi berasal dari perempuan dalam kamp, namun bukan berarti setiap kasus terjadi di dalam kamp. Artinya, kekerasan telah terjadi sebelum mereka berstatus sebagai pengungsi. Akan tetapi tidak disangkal bahwa kekerasan terhadap perempuan memang lebih banyak terjadi di dalam

barak-barak pengungsian. Ada beberapa sebab yang melatari tingginya angka kekerasan dalam barak pengungsian. Diantaranya adalah, *pertama*, korban konflik mengalami gangguan jiwa dari mulai stress ringan hingga gangguan kejiwaan yang akut. Gangguan ini bisa dipahami karena mereka selain telah kehilangan keluarga, sumber daya ekonomi yang selama ini menjadi sandaran kehidupannya pun turut lenyap. *Kedua*, tekanan itu bertambah berat karena ketidakjelasan masa depan. Mereka harus terusir dari kampung halaman mereka sementara mereka juga harus berhadapan dengan penduduk di tempat baru yang juga tidak menghendaki keberadaan mereka. *Ketiga*, dalam barak pengungsian tidak terdapat batasan yang jelas antara daerah privat dan wilayah publik. Pemisah antara barak laki-laki dan perempuan hanyalah selembar kain seadanya. *Keempat*, karena desakan ekonomi, banyak perempuan yang terjerumus menjadi pekerja seks komersial. Kecenderungan ini nampaknya hampir terjadi di seluruh wilayah konflik yang tersebar dari Aceh hingga Papua.

Pihak lawan umumnya menyerang tubuh perempuan untuk melemahkan kekuatan laki-laki dari keluarganya maupun kelompok tertentu. Perempuan juga mengalami pemaksaan dari kelompoknya sendiri antara lain untuk membangun identitas, seperti pemaksaan pemakaian jilbab yang pernah dilakukan Laskar Jihad terhadap perempuan muslim pada konflik Poso. Di sisi lain situasi konflik yang menimbulkan segala macam tekanan secara personal sering disalurkan laki-laki dengan melakukan kekerasan terhadap perempuan di lingkungan terdekatnya. Semua serangan terhadap perempuan ini tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkontruksi bahwa perempuan sebagai objek, dalam konteks ini termasuk objek seksual dan objek kemarahan.

Dengan demikian upaya-upaya pemulihan untuk perempuan korban kekerasan pasca konflik menjadi kebutuhan mendasar bagi keberlangsungan hidup perempuan Timor Timur. Upaya pemulihan telah dilakukan antara lain oleh Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB), salah satu kelompok yang melakukan upaya-upaya pemulihan bagi perempuan korban di kamp pengungsian. Tim yang diprakarsai oleh aktivis perempuan, rohaniawan dan akademisi ini, bekerja di empat wilayah di Timor Barat yaitu Kupang, Soe, Kefa, dan wilayah perbatasan Atambua. Dengan dibantu sekitar 60 relawan yang sebagian besar

perempuan, tim ini melakukan tiga tahapan upaya pemulihan yang dijalankan di 74 kamp pengungsi. Pada tahun 2000, TKTB I melakukan investigasi berkaitan dengan kekerasan yang dialami perempuan. Pada masa ini, adalah masa terberat yang dialami perempuan pengungsi dan para relawan yang melakukan investigasi. Hery Mamboik memaparkan pada masa ini, para lelaki yang mantan milisi memiliki senjata dan membawanya dengan bebas setiap saat. Selain itu, secara umum situasi memanas karena banyak pengungsi yang merasa dibohongi atas pemindahan paksa mereka yang diming-imingi akan diberikan rumah. Setiap hari ia melihat perempuan mengalami kekerasan tanpa ada orang yang mau peduli. Para relawan harus bekerja lebih keras untuk menumbuhkan keberanian kepada para perempuan untuk sekadar *curhat* atas kekerasan yang mereka alami.

Baru kemudian pada TKTB II, para relawan memungkinkan untuk melakukan konseling terhadap perempuan korban. Selanjutnya pada TKTB III mulai dikembangkan pembentukan kelompok perempuan di kamp-kamp pengungsian. Konseling kelompok mulai dijalankan dengan strategi pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi ini antara lain menjalankan keterampilan kristik (bahan kawat yang disulam dengan benang wol untuk membuat sebuah gambar sebagai hiasan dinding), sesuai dengan kebutuhan kelompok. Pada tahapan ini perempuan korban mulai saling membicarakan kekerasan yang mereka alami, dan berani melaporkan pengalaman mereka itu kepada para pastor.

Upaya-upaya pemulihan ini terus berlanjut dengan dukungan NGO perempuan di wilayah pengungsian. Saat ini terdapat empat kelompok perempuan di empat kamp pengungsian di Kecamatan Kota Atambua, kabupaten Belu, NTT. Kelompok ini tersebar di kamp Tulamalai, Kamp Lolowa, Kamp Tenibot, Kamp Haliwen. Kelompok ini memusatkan perhatian pada layanan konseling perempuan korban kekerasan dan upaya pemberdayaan ekonomi. Di masing-masing kamp terdapat 7-10 ibu yang bisa memberikan konseling bagi ibu-ibu yang lainnya. Forum Peduli Perempuan Atambua (FPPA) berupaya mendorong terbangunnya pendampingan di kamp pengungsian, dengan mempersiapkan kelompok perempuan ini, melalui *training* konseling, lokakarya dan seminar yang berkaitan dengan penanganan perempuan korban kekerasan. Suster Sisilia (koordinator FPPA) menyampaikan, selain upaya-upaya

pemulihan trauma, kelompok perempuan ini juga menjalankan berbagai usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Usaha produktif yang dijalankan berupa kegiatan menenun, menjahit, menganyam, dan berdagang.

Kelompok serupa tumbuh di 3 kecamatan yang berbatasan dengan daerah Ambenu, Timor Leste, yaitu di Desa Tes, Desa Sainoni, Kecamatan Miomaffo Timur, Desa Tefeantali Kecamatan Insana dan Desa Popnam, Kecamatan Noimule. Berbeda dengan perempuan pengungsi di Atambua yang tinggal di kamp-kamp pengungsian, keempat desa ini, keluarga pengungsi tinggal di rumah-rumah sebagaimana penduduk lokal. Kelompok perempuan ini melakukan pemberdayaan ekonomi dengan menawarkan kelompoknya untuk bekerja di kebun orang, kemudian upahnya dikelola kelompok. Mereka secara kelompok juga membuat kebun sayur, dan menerima pesanan tenunan dan anyaman.

Dalam suatu diskusi Helena Ninef, ketua kelompok perempuan di Desa Tes menyampaikan, pada awalnya mereka mendapatkan modal untuk menenun Rp. 100.000 dari YABIKU (Yayasan Bife Kuan),⁵ sampai kemudian dari keuntungan jual kain tenun ini, mereka berhasil membuat usaha simpan pinjam dengan bunga rendah untuk anggota kelompoknya.

Selain melakukan kegiatan menjalankan usaha produktif tersebut, penerimaan oleh masyarakat lokal terhadap kedatangan mereka adalah kebutuhan mendasar. Filly Tahu, koordinator YABIKU menyampaikan saat ini kelompok perempuan tersebut telah berhasil meyakinkan tokoh-

tokoh dari lembaga adat untuk menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat setempat. Penerimaan dilaksanakan secara resmi melalui upacara adat setempat. Sedangkan untuk membantu pemulihan



perempuan korban kekerasan, kelompok ini juga melakukan diskusi sebulan dua kali, untuk membicarakan masalah kekerasan, gender, dan kesehatan reproduksi berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari.

Pada perkembangannya, kelompok perempuan ini terlibat dalam proses rekonsiliasi yang dijalankan dan bekerjasama dengan CAVR (Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi).⁶ CAVR Timor Leste bekerjasama dengan beberapa NGO di Timor Barat untuk menjalankan program mereka, antara lain pengungkapan kebenaran dan pembangunan rekonsiliasi berkaitan dengan konflik di Timor Leste antara tahun 1974 hingga Oktober 1999. Program ini kemudian memberi peluang kepada perempuan pengungsi tidak saja untuk mengungkapkan kepada publik atas kekerasan yang mereka alami tetapi juga untuk melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai.

Menurut Filly Tahu, proses pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang dijalankan di 12 Desa di Kabupaten Kefamanu, telah melahirkan rekonsiliasi di antara janda FRETILIN dan isteri UDT dan milisi di kamp-kamp pengungsian. Proses serupa terjadi pada Audensi Publik Kekerasan Terhadap Perempuan di Dilli pada 28-29 April 2003 yang dihadiri Komnas Perempuan dan aktivis perempuan dari Timor Barat. Pada sesi pengungkapan kebenaran Rita da Silva menyampaikan pengalamannya saat diperkosa oleh anggota FRETILIN pada tahun 1975, sementara itu Victoria Henrique berkata :

"Saudariku menderita karena diperkosa oleh orang FRETILIN. Aku, anggota FRETILIN, diperkosa oleh orang UDT. Kami sama-sama menderita di tangan laki-laki." Victoria berdiri di podium, memeluk Rita da Silva sambil menangis. Kami sudah merdeka. Kami menderita karena bendera ini. Ia membenamkan wajahnya ke bendera tersebut. "kita ini bersaudara." Ia lalu meminta pemimpin politik Timor memastikan bahwa kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi. Ia berkata bahwa merdeka adalah milik semua orang Timor, dan meminta para pemimpin politik saling berpelukan seperti yang ia lakukan terhadap Rita. Pengunjung yang memadati aula ikut menangis dan bertepuk tangan pada saat bersamaan.⁷

Berdasarkan pengalaman pemulihan konflik perempuan Timor Timur

baik yang berada di Timor Leste maupun yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Timor Barat menunjukkan bahwa kekuatan perempuan sebagai agen yang mampu mempertahankan keberlangsungan hidup dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat yang bertikai. Perempuan menjadi pertahanan terakhir yang mampu mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya dalam situasi bahkan pasca konflik, dengan segala kreatifitas yang mereka kembangkan, sebagaimana perjuangan yang dilakukan kelompok perempuan di Desa Tes. Mereka juga menjadi kelompok terdepan yang berani untuk menyatakan kebenaran dan mengajak rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai, sebagaimana yang dilakukan Rita da Silva dan Victoria Henrique.

Catatan Belakang

- ¹ Lihat, Karen Cambel Nelson dkk, **Perempuan dibawa/h Laki-laki yang Kalah: Kekerasan terhadap Perempuan Timor Timur dalam Kamp Pengungsian di Timor Barat** (Kupang: JKPIIT dan PIKUL, 2000) hal. 104.
- ² Lihat, FOKUPERS, **Menyilam Kemarau Upaya Perempuan Timor Loro Sae Menyudahi Kekerasan, Sebuah Awal** (Dilli: FOKUPERS bekerja sama dengan PIKUL dan JKPIIT, 2000) hal. 66 – 67.
- ³ Tim Kemanusiaan Timor Barat (TKTB) dibentuk pada 23 Desember 1999 oleh sejumlah aktifis NGO Perempuan di Timor Barat bersama sejumlah akademisi dan tokoh agama. Tim ini dibentuk berdasarkan keprihatinan terhadap keadaan perempuan dalam kamp-kamp pengungsian, dan pengamatan bahwa pada umumnya perempuan tidak cukup mendapat perhatian khusus, baik dari pemberian bantuan kemanusiaan maupun dari kelompok-kelompok yang sudah atau sedang mendokumentasikan pelanggaran HAM. TKTB didukung oleh lebih kurang 45-60 yang melakukan investigasi dan konseling di 74 kamp pengungsi dari kurang lebih 200 kamp di Timor Barat.
- ⁴ Karen Campbell Nelson dkk, *op.cit.*, 2000, hal. 137-138.
- ⁵ Yayasan Bife Kuan adalah NGO Perempuan yang fokus pada pendampingan perempuan korban dan pemberdayaan perempuan pengungsi di Kefa, NTT.
- ⁶ Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) Timor Leste adalah badan independen yang menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia antara April 1974-Oktober 1999. Berdasarkan Regulasi UNTAET 2001/10 lembaga ini berfungsi untuk a) Pengungkapan kebenaran; b) Rekonsiliasi Komunitas; c) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah.
- ⁷ Saparinah Sadli dkk, **Menggelar Tikar Perdamaian, Komisi nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan**, (Jakarta: Komnas Perempuan, Oktober 2003) hal. 24.





***Catastrophe* (Tragedi, bencana, penderitaan)**

Dalam tulisannya “The Feminisation of Catastrophe”, Ronit Lentin menuturkan bahwa di wilayah yang bergejolak, perempuanlah pihak yang paling menderita. Mereka rentan terhadap kekerasan dan kelaparan, namun hal yang utama menjadi keprihatinan tetaplh anak-anak mereka. Perempuan kerap memberikan makanan terakhir mereka pada anaknya, dan ketika ia sendiri harus menyerahkan nyawanya, maka potret yang digambarkan Lentin di wilayah-wilayah Afrika adalah seorang anak masih menyusu pada payudara jasad ibunya. Karenanya tak jarang perempuan digambarkan sebagai “korban universal” ini karena ia selalu terkait dengan peran-peran keibuannya. *Catastrophe*

sendiri diartikan sebagai tragedi kemanusiaan, bencana, penderitaan dan ketidakpastian masa depan.

Genocide (Penumpasan etnis tertentu)

Genocide diartikan sebagai proyek politis yang juga berbasiskan gender, sebab aksi-aksi yang menyertai penumpasan etnis tersebut biasanya termasuk perdagangan manusia, perkosaan massal, sterilisasi massal, dan pembunuhan perempuan agar tidak melahirkan bayi-bayi etnis tertentu, dan sebagainya.

Housing (Permukiman)

Persoalan hidup berumah tangga bagi perempuan di negara-negara dunia ketiga merupakan hal yang cukup kompleks, sebab tak jarang mereka jadi kehilangan aspek hidup yang sangat privat dikarenakan harus tinggal seataap dengan mertua, kakak ipar, adik ipar dan sebagainya. Tak ayal perempuan banyak yang ngalami tekanan jiwa, apalagi jika suami harus pergi ke kota untuk mencari nafkah. Pergunjungan dan konflik di lingkup domestik maupun pertetanggaaan (*neighbourhood*) kerap pula mewarnai hidup para istri tersebut.

Di wilayah konflik yang memaksa penduduk untuk mengungsi di kamp-kamp, persoalan tersebut kian rumit, sebab barak pengungsian umumnya sifatnya terbuka, berjejal-jejal dengan segala sarana yang terbatas. Kebutuhan kaum perempuan menjadi terabaikan dan tak jarang mereka mengalami pelecehan seksual, didera rasa tidak aman dan nyaman, terserang penyakit akibat sanitasi yang kurang, malnutrisi, dan sebagainya. Itu sebabnya segala kebijakan pemerintah tentang penanganan pengungsi mulai dari kamp pengungsian hingga relokasi amatlah penting artinya untuk melibatkan masyarakat perempuan, ini semata agar kebutuhan-kebutuhan perempuan yang spesifik tidak terabaikan.

Rape (Perkosaan)

Tindak perkosaan dipahami sebagai aksi politis dari terorisme yang digunakan oleh semua laki-laki untuk mengintimidasi dan menindas semua perempuan. Ini merupakan pergeseran analisis kaum feminis di awal 1970-an yang berubah dari konsep perkosaan sebagai aksi seksual

dan kejahatan atas hak-hak kepemilikan (seperti halnya dipahami oleh konsep tradisional di bawah patriarkis) kepada konsep ketika perkosaan lalu dipahami sebagai taktik utama yang digunakan laki-laki agar perempuan tetap menjadi obyek dan menjadi metafor pada segala relasi laki-laki – perempuan di masyarakat yang seksis. Susan Brownmiller dalam tulisannya berjudul “Subject Against Our Will” juga menyatakan bahwa dalam perkosaan, laki-laki menggunakan alat kelaminnya sebagai salah satu senjata dan simbol superioritasnya.

Di masyarakat kita, meski perkosaan dikategorikan sebagai kejahatan jauh sebelum para feminis meredefinisikannya, namun perkosaan juga kerap dijadikan bahan lelucon, perempuan sering dituding menginginkannya meski kemudian menyangkal. Perkosaan terkadang juga sulit dibuktikan dikarenakan posisi tawar perempuan yang cenderung lemah terhadap kekasihnya, karena takut kehilangan dan di bawah tekanan serta takut atas aib yang diterima perempuan yang bersangkutan apabila membeberkan tindak perkosaan yang dialaminya.

Refugees (Kaum Pengungsi)

Berdasarkan data Palang Merah Internasional, di tahun 1995 saja jumlah manusia yang mengungsi di seluruh dunia tak kurang dari 14,4 juta orang mengungsi dan mencari suka, sementara sejumlah 21,6 juta orang telah kehilangan tempat tinggal. Perempuan sendiri kerap menjadi korban kekerasan dan kelaparan semasa mengungsi.

Rights of Rape Victims (Hak-hak korban perkosaan)

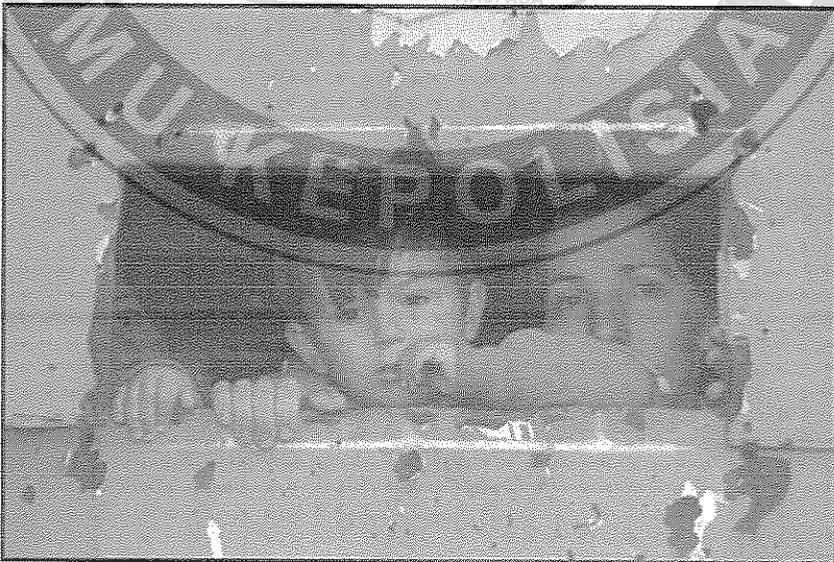
Tuntutan dari sebuah organisasi “Rape Crisis Center” di Washington DC, adalah agar korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya yang antara lain meliputi:

- Hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat selama pertanyaan diajukan.
- Hak untuk mendapatkan pemahaman hukum dan prosedur atas kasus perkosaan yang dialaminya serta perannya sebagai saksi bagi negara.
- Hak untuk mendapatkan pelayanan medis dan psikologis secara gratis dan intensif dari orang-orang yang sudah dilatih secara profesional.

- Hak untuk memilih tindakan preventif secara medis.
- Hak untuk mendapatkan bukti-bukti terbaik di persidangan.
- Hak untuk mendapatkan dukungan dari *crisis center* serta para sahabat.
- Hak untuk menerima representasi hukum yang mendukung korban.
- Hak untuk mendengarkan perkembangan awal atas kasus tersebut mulai sebelum penahanan dilakukan.
- Hak atas kehidupan pribadi, termasuk bahwa pengalaman seksual tidak dapat diberberkan sebagai bukti di pengadilan.
- Hak untuk diperhitungkan sebagai saksi yang kredibel.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan dari ketakutan dan ancaman kekerasan apapun selama proses hukum.

Widowhood (Kejandaan)

Dalam sebuah *workshop* yang berjudul “Widowhood and armed conflict: challenges faced and strategies forward” yang diselenggarakan oleh Komite Palang Merah Internasional dan Palang Merah Australia pada bulan November 1999, dibahas pentingnya mengatasi berbagai persoalan berkaitan dengan meningkatnya keberadaan janda akibat



proliferasi konflik bersenjata, serta status darurat sipil dan militer di berbagai negara. Ini menjadi penting dikarenakan status janda mengubah peran perempuan di bidang sosial dan ekonomi secara drastis baik di lingkup kerumahtanggaan maupun komunitas.

Widowhood atau kejandaan juga berdampak pada faktor psikologis khususnya rasa tidak aman, dan berpengaruh pada identitas kultural serta mobilitas perempuan dan anak-anak. Kejandaan juga kadang berdampak pada akses mereka terhadap kebutuhan primer, pelayanan umum khususnya kesehatan dan seringkali menimbulkan persoalan atas kepemilikan tanah dan harta benda. Sama halnya dengan perempuan yang suaminya menghilang atau belum diketemukan di wilayah konflik juga merasakan hal-hal di atas.

Diperlukan sebuah lembaga yang mampu merangkul mereka dan mendengarkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai pihak juga harus memberi dukungan pada mereka saat mereka mengalami masa-masa ekonomi yang sulit dan pengucilan yang dilakukan masyarakat tradisional yang patriarkis. Intinya, dalam masyarakat yang patriarkis seorang perempuan dapat kehilangan seluruh status sosialnya apabila suaminya meninggal. Perempuan juga harus mengambil alih semua peran yang selama ini dilakukan oleh suaminya sebagai pencari nafkah utama. Jika tidak memiliki ketrampilan, maka ia kian sulit mendapatkan pekerjaan.

Komite Palang Merah Internasional sendiri selama ini telah berupaya membantu kelompok-kelompok rentan terutama para janda. Mereka berharap bahwa kian banyak pihak yang peduli pada persoalan ini khususnya pemerintah negara-negara dalam program-program yang spesifik memulihkan kondisi wilayah bertikai. Program yang direkomendasikan bagi para janda korban konflik tersebut antara lain konseling psikologis berupa pemulihan mental dan harga diri, pelatihan hukum, fasilitas perumahan, ketrampilan usaha, dan menerima modal usaha atau masuk dalam jaringan mikro kredit. (AV)

(Disadur secara bebas dari: Suki Ali, Kelly Coate and Wangui Wa Goro (Eds.), *Global Feminist Politics: Identities in Changing World*, Rotledge, London & New York, 2000, <http://www.icrc.org>, dan Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism*, Arrow Book Ltd., 1986).